

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mencari sumber data dan inspirasi berdasarkan penelitian-penelitian terlebih dahulu berupa jurnal, skripsi, ataupun tesis yang relevan dengan tema penelitian yang penulis ambil, hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dan juga menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu itu, diantaranya adalah:

Penelitian pertama adalah penelitian yang penulis baca berupa skripsi berjudul **“Musik K-Pop sebagai Alat Diplomasi dalam Soft Power Korea Selatan”**²⁵, penelitian ini ditulis oleh mahasiswa mahasiswi dari Universitas Satya Negara Indonesia. Sudut pandang penulis mengatakan bahwa K-Pop merupakan sebuah tren baru yang berkembang menyebar ke pasaran global. Hal ini tentu saja menjadi Langkah baru bagi Korea Selatan untuk menciptakan kebijakan luar negerinya dimana Korea Selatan menggunakan budaya K-Pop sebagai power baru dalam menjalankan pemerintahannya dan melakukan kerja sama dengan negara lain di bidang kebudayaan, mengigit penggiat budaya K-Pop berasal dari seluruh dunia. Hal yang ditempuh Korea Selatan bisa dibilang sangat bijak karena dengan melakukan diplomasi *soft power* ini, Korea Selatan mampu meningkatkan citranya di ranah global, tidak hanya itu, perekonomian negara ini juga turut meningkat. Persamaan antara judul di atas dengan penelitian penulis adalah diplomasi dengan menggunakan *soft power diplomacy*. Seperti yang diketahui, *power* atau kekuatan merupakan faktor yang penting serta utama dalam Hubungan Internasional. Kelompok-kelompok masyarakat (negara) dalam suatu sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya dilakukan secara moral. Tetapi demikian, kekuatan tidak hanya sesuatu yang bersifat destruktif atau menghancurkan. *Power* atau

²⁵ Alam, Syafril dan Nyarimun, Ansgrasia Jenifer. “Musik K-Pop Sebagai Alat Diplomasi dalam Soft Power Korea Selatan”, *International Diplomacy* Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2017)

kekuatan terlebih merupakan kolaborasi antara pengarus persuasif dan kekuatan koersif.²⁶ Kekuatan juga dapat diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, territorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik, serta kepiawaian diplomasi internasional.²⁷ Oleh sebab itu, *national power* suatu negara tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga tingkat teknologi yang dikuasai suatu negara lalu sumber daya alam, bentuk pemerintahan dan kepemimpinan politik dan ideologi. Definisi lain dari *power* dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman atau perampasan hak-hak sedangkan pengaruh memiliki arti sebuah kemampuan untuk hal-hal yang sama melalui proses yang melibatkan negosiasi, janji-janji, atau memberikan sebuah keuntungan. Dalam arti lain, *power* adalah kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan atau dipentingkan untuk mencapai kepentingan politik luar negeri melalui control terhadap lingkungan eksternal yang berubah.²⁸

Persamaan pada kedua penelitian ini merupakan cara sebuah negara melakukan pendekatan atau diplomasi dengan negara lain melalui *soft power diplomacy*, yang tidak melibatkan senjata ataupun militer. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah obyek negara yang telah diteliti.

Penelitian selanjutnya adalah tesis dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yang masih berhubungan dengan diplomasi kebudayaan berjudul “**Diplomasi Budaya Indonesia Dalam Menciptakan Nation Branding melalui Batik (2009-2017)**”²⁹. Praktik Diplomasi Budaya diterapkan oleh tesis ini. Diplomasi Budaya diterapkan untuk mempromosikan batik sebagai *Intangible Cultrual Heritage* atau Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009. Pada penelitian ini pula tidak hanya dijelaskan mengenai nilai Batik dan mengapa Batik dapat dikategorikan sebagai warisan budaya, tetapi dijelaskan pula bahwa batik merupakan kain tradisional asal Indonesia dengan berbagai macam motif dari daerah-daerah di Indonesia yang masing-masing memiliki arti dan nilai tertentu. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai kebijakan

²⁶ Rourke, John T. “*International Politics on The World Stage*”. New Jersey:Mac Millan. 1995. Halaman. 255

²⁷ Lebow, Richard Ned. “*International Organization*”. Cambridge University. 1994. Halaman. 250

²⁸ Kegley, Charles W, dan Wittkopf, Eugene R. “*The Global Agenda : Issues and Perspective*”. New York : McGraw Hill. 1992. Halaman. 450

²⁹ Hartati, Ana Yulia. “*Diplomasi Budaya Indonesia dalam Menciptakan Nation Branding melalui Batik (2009-2017)*”, Universitas Wahud Hasyim Semarang

yang diambil pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda, hal ini dapat menciptakan *nation branding* Indonesia melalui batik, dengan begitu Indonesia dapat memperkuat posisinya untuk mengakui bahwa batik merupakan kebudayaan asli Indonesia setelah ditetapkan oleh UNESCO.

Persamaan judul di atas dengan penelitian penulis adalah pendekatan budaya yang terdapat di dalam penelitian ini, yang menjadi perbedaan adalah obyek yang diteliti. Seperti yang diketahui Batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009³⁰, sehingga saat ini di Indonesia setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Vincent Kuitenbrouwer dengan judul "*Beyond the Trauma of Decolonization: Dutch Cultural Diplomacy during the West New Guinea Question (1950-1962)*"³¹. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai diplomasi kebudayaan di Papua Nugini yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari sejarah panjang yang pernah dilakukan oleh Belanda di daerah ini, termasuk sejarah penjajahan. Penulis dalam penelitian dengan judul di atas ini yaitu Kuitenbrouwer mempunyai pendapat bahwa para pembuat kebijakan dan diplomat Belanda menyadari bahwa dekolonisasi yang dilakukan oleh Belanda memberikan kesempatan berupa peluang, bukan hanya ancaman terhadap posisi internasional Belanda. Banyak argumen yang dikemukakan mengenai New Guinea sebagai pusat kebijakan baru pembangunan pada tahun 1960-1970 an. Penelitian yang ditulis oleh Kuitenbrouwer ini dapat menjadi inspirasi atau referensi untuk meneliti bagaimana Belanda menciptakan kebijakan berupa diplomasi kebudayaan kepada negara bekas jajahan nya.

Persamaan penelitian di atas dengan napa yang sedang penulis lakukan adalah subyek negara yang melakukan diplomasi kebudayaan terhadap negara bekas jajahan nya yaitu New Guinea atau Papua Nugini, dimana Belanda menciptakan kebijakan berupa diplomasi kebudayaan kepada negara bekas jajahan nya, sementara perbedaan yang dapat

³⁰ Situs Resmi Intangible Cultural Heritage UNESCO, "Indonesian Batik", (<https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-batik-00170>)

³¹ Kuitenbrouwer, Vincent. "Beyond the Trauma of Decolonization: Dutch Cultural Diplomacy during the West New Guinea Question (1950-1962)", *The Journal of Imperial and Commonwealth History* Vol. 44, (April 2016)

dilihat dari kedua penelitian ini adalah obyek negara penerima diplomasi kebudayaan tersebut.

Yang keempat, merupakan penelitian berjudul “*Expression and Emotion: Cultural Diplomacy and Nation Branding in New Zealand*”³² yang ditulis oleh Katherine MacDonald. Pada penelitian dengan judul diatas, Katherine MacDonald menjelaskan tentang berbagai bentuk diplomasi *soft power*, yang terdiri dari *cultural diplomacy* atau diplomasi kebudayaan, *public diplomacy* atau diplomasi publik, maupun *nation branding* atau nilai bangsa, hingga dijelaskan pula mengenai propaganda dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Diplomasi Kebudayaan dianggap menjadi bagian yang penting dari sebuah diplomasi menurut MacDonald dalam penelitiannya. Hal tersebut demikian karena sebuah negara dapat menyajikan budaya bangsa masing-masing secara internasional dan menggunakan kebudayaannya sebagai *soft power diplomacy* untuk membangun dan memelihara hubungan yang akan bernilai. Pada tulisan ini dimuat mengenai keberhasilan Selandia Baru dalam menggunakan program diplomasi kebudayaannya dan mampu untuk membentuk hubungan jangka panjang, mempromosikan pemahaman, dan kemampuan Selandia Baru untuk membangun citra yang khas dan menarik bagi masyarakat internasional.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebuah upaya berdiplomasi yang dilakukan kepada negara oleh negara lain menggunakan *soft power* yaitu kebudayaan. Perbedaan antara kedua penelitian ini bisa dilihat dari aktor yang berperan didalamnya yakni berasal dari negara yang berbeda, serta persamaan yang bisa dilihat dari kedua penelitian ini adalah upaya kedua negara yakni Selandia Baru (pada penelitian diatas) dan juga Belanda (pada penelitian penulis) sama-sama membangun sebuah citra baik bagi negaranya di hadapan masyarakat internasional, terutama Belanda membangun kembali citra baik di negara bekas jajahannya, yaitu Indonesia.

Penelitian terakhir merupakan penelitian yang ditulis oleh Sophie Heyligers dengan judul “*The Cultural Policy Towards China of The Netherlands Compared to: Denmark,*

³² MacDonald, Katherine. “*Expression and Emotion: Cultural Diplomacy and Nation Branding in New Zealand*”, Victoria University of Wellington Press, (Maret 2011)

France, Germany, & The UK”, penelitian ini ditulis oleh Heyligers untuk *DutchCulture*.³³ Penelitian ini merupakan perbandingan atau *Comparative Research* dan menjelaskan mengenai eksplorasi yang telah dilakukan oleh Belanda melalui kebijakan baru-baru ini dan upaya mendorong pertukaran budaya dengan Tiongkok. Dalam penelitian ini dimuat bagaimana Belanda mempersiapkan *International Cultural Policy* nya yang terdiri dari tujuan, anggaran yang dikeluarkan, hingga pelaksanaan kegiatan kebudayaan Belanda di Tiongkok. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh Belanda, Belanda bertujuan untuk memperluas pasar seni Belanda di luar negeri, lalu menumbuhkan serta menciptakan pertukaran budaya yang dapat meningkatkan citra baik Belanda di luar negeri, serta mempererat hubungan Belanda dengan negara lain dengan mendukung hubungan ekonomi dan politik internasional. Selain tujuan-tujuan ini, terdapat pula sasaran kebijakan yang ingin dicapai oleh Belanda, antara lain meningkatkan kepentingan ekonomi Belanda dengan menekankan hubungan antar budaya, perdagangan dan ekonomi serta menumbuhkan citra positif bagi Belanda. Informasi yang diberikan pada penelitian ini oleh Heyligers dianggap penulis sangat berguna karena dapat dilihat bagaimana Belanda melakukan upaya diplomasi kebudayaan di Tiongkok, serta dapat dijadikan perbandingan dan acuan tentang bagaimana Belanda melakukan diplomasi kebudayaan di Indonesia. Penelitian komparatif penulis anggap sangat berguna dan bermanfaat dalam pembuatan kebijakan di masa depan.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kebijakan Internasional Kebudayaan atau *International Cultural Policy*. Perbedaan yang dapat dilihat adalah obyek negara nya.

Setelah penulis melihat dan membaca kelima referensi atau penelitian terdahulu diatas, penulis menyimpulkan bahwa kelima referensi tersebut memiliki keterkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh penulis, sehingga dapat dikumpulkan informasi-informasi oleh penulis mengenai informasi terkait dengan upaya diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara nya masing-masing. Meskipun demikian, penulis beranggapan bahwa kelima referensi tersebut belum

³³ Heyligers, Sophie. “*The Cultural Policy Towards China of The Netherlands Compared to: Denmark, France, Germany, and The UK*”, DutchCulture, (Februari 2016)

dapat menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, dan diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

2.2 Kerangka Teori

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat konsep-konsep yang relevan dan sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil, diantaranya adalah:

2.2.1 Teori Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi Kebudayaan atau *Cultural Diplomacy* umumnya disebut sebagai *International Cultural Policy* atau *Foreign Cultural Policy*. Pada dasarnya Diplomasi Kebudayaan sangat berkaitan dengan politik internasional. Keterkaitan antara diplomasi kebudayaan dan politik internasional menjadikan hal ini sebagai alat yang digunakan dalam praktik diplomasi tertentu.

Diplomasi Kebudayaan merupakan bagian dari diplomasi publik yang akan berjalan secara efektif bila adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat sipil satu sama lain. Diplomasi diawali dan diakhiri dengan adanya hubungan antara negara, namun peran masyarakat menjadi aspek yang sangat penting, keefektifan hubungan diplomasi tersebut akan berjalan apabila adanya kerja sama, dukungan dari *private sector*, dan manajerial jaringan, serta pembentukan opini publik yang berawal dari masyarakat sipil.³⁴

Dalam praktik diplomatik kontemporer, diplomasi budaya memiliki berbagai arti atau definisi. Macam-macam ragam definisi mengenai diplomasi budaya ini adalah *evidence* atau bukti bahwa banyak sarjana dan praktisi Hubungan Internasional berupaya untuk menyoroti aspek lain dari fenomena ini, biasanya masalah ini disoroti tergantung

³⁴ Jora, Lucian. "New Practices and Trends in Cultural Diplomacy", Institute of Political Sciences and International Relations, Romanian Academy, (Bucharest:2013), Halaman. 43-44

pada konteks atau isu apa yang akan dibahas, serta kebutuhan para praktisi pada umumnya. Dalam arti lain definisi dari diplomasi budaya seringkali dapat bervariasi tergantung dari negara asal dan skala prioritas serta kepentingan kebijakan luar negeri negara masing-masing.³⁵

Definisi diplomasi budaya juga digagaskan oleh Albrecht Enders yang merupakan seorang Diplomat Jerman. Enders mengemukakan bahwa definisi diplomasi budaya merupakan instrumen yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk politik. Walaupun diplomasi budaya memiliki tujuannya tersendiri, namun tujuan diplomasi budaya berasal dari kebijakan luar negeri yang bersifat umum.³⁶

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebuah budaya memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam meningkatkan reputasi suatu negara, hal ini dikarenakan suatu negara dapat mengarahkan persepsi oleh penerimanya kepada sector-sector yang akan memungkinkan pemahaman lebih baik terhadap budaya itu sendiri dan nilai-nilainya. Interaksi dalam diplomasi budaya dianggap penting dan dapat berjalan di suatu negara tertentu, di luar negeri dengan memanfaatkan media yang dapat menjangkau dalam suatu negara maupun di luar negeri.³⁷

Suatu negara melakukan diplomasi kebudayaan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, secara tradisional, suatu negara melakukan diplomasi kebudayaan untuk menfapai tujuan idealistik, contohnya adalah mengembangkan rasa saling pengertian dan toleransi, memrangi etnosentrisme dan stereotip, serta mencegah konflik.

Selain itu, diplomasi budaya juga memiliki tujuan fungsional, diantaranya adalah meningkatkan kepentingan ekonomi, memajukan perdagangan, serta memperkuat politik dan diplomatik. Lalu juga mengembangkan hubungan bilateral di seluruh badan negara, termasuk elemen ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan diplomatik, serta menghubungkan praktisi diplomasi budaya dengan kelompok di luar negeri, dan

³⁵ Pajtinka, Erik. "Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations", Belianium Matej Bel University Press, Vol. XVII, (Desember 2014), Halaman 99

³⁶ Patjinka, Erik. 2014, halaman. 99-100

³⁷ Ryniejska, Marta. "Cultural Diplomacy as a Form of Communication", University of Wroclaw, (2009), Halaman. 11

membantu memelihara hubungan bilateral pada saat ketegangan.³⁸ Eksistensi diplomasi budaya tidak hanya mewujudkan kepentingan nasional negara yang melaksanakan diplomasi budaya, namun pula mewujudkan dan memajukan kepentingan nasional negara lain.

Pada dasarnya fungsi dan tujuan utama dari diplomasi budaya adalah dilakukannya negosiasi dan ruang lingkup di dalam diplomasi adalah untuk menyelesaikan suatu perbedaan yang ada serta menjamin sebuah kepentingan nasional suatu negara melalui hasil negosiasi antara negara-negara yang melakukan diplomasi dengan sukses.

Pada bukunya yang berjudul **“Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia”** yang ditulis oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari mengemukakan bahwa diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui bidang kebudayaan, baik secara mikro (pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian), ataupun secara makro dengan ciri khas nya yaitu propaganda dan lain lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, maupun militer.³⁹

Selain itu, Erik Pajtinka dalam tulisannya berjudul **“Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations”** mengelompokkan praktik diplomasi budaya menjadi enam bagian, diantaranya adalah:

1. *Assisting Cultural Subjects in the dissemination of national culture and cultural identity.* Yang artinya adalah membantu penyebarluasan mata pelajaran budaya sebagai budaya nasional atau identitas budaya. Artinya adalah pemerintah melakukan diplomasi kebudayaan dengan cara memfasilitasi para pelaku budaya dalam penyebarluasan kebudayaan nasional negara mereka. Bantuan yang dilakukan pemerintah ini dapat berupa penyediaan dukungan logistik, teknis, organisasi dan atau lainnya kepada seniman, NGO yang relevan dengan

³⁸ Mark, Simon. *“A Greater Role for Cultural Diplomacy”*, The Hague: Netherlands Institute of International Relations Maastricht University, (April 2009), Halaman. 9.

³⁹ Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. *“Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia”*, (Yogyakarta 2007), Halaman. 17

pelaku budaya terkait, lembaga budaya, atlet dan atau subyek budaya relevan lainnya dari negara asal selama kegiatan berlangsung di negara penerima. Bentuk nyata dari dukungan ini biasanya tergantung dari kondisi lokal negara penerima diplomasi budaya, dan juga tergantung pada kebutuhan individu dari subjek budaya yang bersangkutan. Contohnya adalah seniman atau subjek budaya lain yang melakukan kegiatan diplomasi budaya seperti konser atau pameran di negara-negara lain yang memiliki infrastruktur budaya yang bisa dibbilang kurang, sehingga bantuan diplomasi budaya dari negara asal sangat dibutuhkan.

2. *Promoting dissemination of the national language of the sending state in the receiving state.* Yang artinya adalah mempromosikan bahasa nasional negara pengirim di negara penerima, yang memiliki maksud upaya pemerintah negara asal dalam membantu melalui lembaga pendidikan ataupun akademisi lokal (negara penerima) pada proses pembelajaran bahasa nasional dari negara asal. Dukungan atau bantuan ini dapat berupa pengiriman tenaga pengajar langsung dari negara asal, pendirian lembaga pendidikan seperti perpustakaan dan pusat bahasa, ataupun dengan diadakannya diskusi yang dilakukan oleh masyarakat atau diskusi publik dengan penulis atau tenaga pengajar dari negara asal.
3. *Promoting and explaining cultural values of the sending state in the receiving state.* Yang memiliki arti mempromosikan dan menjelaskan mengenai nilai-nilai budaya negara negara pengirim di negara penerima. Maksud dari poin ini adalah keikutsertaan secara aktif seorang diplomat pada debat publik, kuliah umum, seminar, atau kegiatan serupa yang lain di mana pertanyaan-pertanyaan terkait kebudayaan atau budaya masih bisa dibahas dan dijelaskan. Bagi seorang diplomat, keikutsertaan secara aktif pada kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik dan besar untuk dapat mempengaruhi pandangan politik negara penerima mengenai aspek-aspek budaya negara pengirim dan untuk menjelaskan gagasan-gagasan tertentu, nilai-nilai, atau ideologi negara nya. Hal ini tentu dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam pembuatan

pemahaman yang lebih baik terkait posisi politik dan kepentingan negara pengirim.

4. *Promotion of cooperation among cultural subjects from the sending state and the receiving state.* Yang artinya adalah melakukan promosi kerja sama antara subyek budaya dari negara pengirim ke negara penerima. Hal ini merupakan upaya pemberian informasi kepada pelaku budaya negara pengirim terkait kemungkinan dalam pembangunan kontak dan kerja sama pelaku budaya di negara penerima maupun sebaliknya. Pada beberapa kasus, kegiatan ini tidak hanya menemukan dan memberikan informasi yang relevan, tetapi juga melakukan mediasi komunikasi awal dan negosiasi antara pelaku budaya negara pengirim dan pelaku budaya negara penerima.
5. *Negotiating international treaties on cultural cooperation among sending and receiving state.* Yang artinya adalah melakukan negosiasi mengenai perjanjian internasional tentang kerja sama budaya antara negara pengirim dan negara penerima. Hal ini bermaksud membuat perjanjian yang mengatur aturan pelaksanaan kegiatan pertukaran akademik atau kondisi untuk memberikan beasiswa dari negara penerima selama kegiatan masa belajar mereka ke negara pengirim (dan sebaliknya). Bukan hanya hal diatas, kegiatan ini juga dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan.
6. Yang terakhir adalah *supporting and keeping up contacts with expatriate communities in the receiving state.* Hal ini memiliki arti melakukan dukungan dan menjaga kontak ekspatriat di negara penerima. Yang berarti pada kegiatan ini mencakup penyelenggaraan acara-acara kebudayaan bagi anggota komunitas ekspatriat atau menghadiri acara-acara serupa yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi ekspatriat di negara penerima atau membentuk acara budaya bersama komunitas ekspatriat.⁴⁰

⁴⁰ Pajtinka, Erik. "Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations", Belianium Matej Bel University Press, Vol. XVII, (Desember 2014), Halaman 86-87

Erik Pajtinka membagi menjadi enam klasifikasi aktivitas diplomasi kebudayaan, dan keenam aktivitas yang sudah dijelaskan diatas menjadi acuan penulis dalam menganalisa upaya diplomasi kebudayaan yang telah dilakukan oleh Belanda di Indonesia melalui pengembalian benda cagar budaya Indonesia yang dirampas oleh Belanda pada masa kolonial, atau akrab kita dengar dengan nama program repatriasi benda cagar budaya yang berlangsung pada tahun 2020.

2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam menjalankan sebuah hubungan internasional yang melewati batas negara, aspek kepentingan nasional merupakan poin penting. Tidak ada satu negara di dunia yang tidak mementingkan kepentingan nasional nya, dalam arti lain setiap negara di dunia pasti mengutamakan kepentingan nasional negara nya. Kepentingan nasional biasanya melahirkan kebijakan luar negeri suatu negara, kebijakan-kebijakan yang diambil atau diciptakan suatu negara umumnya bertujuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan nasional nya. Definisi lain terkait kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan suatu negara berdasarkan visi suatu negara yang mana kepentingan negara setiap bangsa dibentuk atas dasar kepentingan yang mencakup dari keamanan yang terdiri dari kelangsungan hidup rakyat nya dan kebutuhan wilayah nya serta kesejahteraan.

Definisi mengenai kepentingan nasional juga datang dari beberapa ahli Hubungan Internasional, salah satunya adalah Hans J. Morgenthau yang mendefinisikan kepentingan nasional sebagai salah satu instrument dalam mengejar kekuasaan demi memiliki kuasa atau control atas negara lain. Tidak hanya hal diatas, kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk dapat melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari

intervensi negara lain. Menurut Morgenthau⁴¹, konsep kepentingan nasional terdiri dari tiga aspek, diantaranya adalah:

- a. Pertama adalah perlindungan terhadap identitas fisik dimana suatu negara harus bisa menjaga dan mempertahankan integritas teritorialnya
- b. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap identitas politik, yang berarti negara mampu mempertahankan nilai-nilai perekonomian dan politiknya.
- c. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap kultur atau budayanya, yang berarti sebuah negara mempunyai kewajiban mampu mempertahankan aspek linguistik dan sejarahnya

Pada dasarnya setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, hal ini didasari oleh para pembuat kebijakan kepentingan nasional tersebut. Oleh sebab itu, tak sedikit kepentingan nasional suatu negara bertentangan dengan negara lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sebuah kepentingan nasional diwujudkan dengan tujuan menguntungkan bagi bangsa atau suatu negara.

Terdapat dua klasifikasi mengenai kepentingan nasional, diantaranya adalah kepentingan primer dan kepentingan sekunder. Kepentingan Primer atau *Primary Interest* adalah perlindungan identitas politik dan budaya, artinya identitas politik dan budaya suatu negara tidak dapat diganggu gugat dan wajib bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingannya tanpa ada jalur tengah dalam perwujudannya. Selanjutnya adalah kepentingan sekunder atau *Secondary Interest*, seperti namanya, kepentingan ini muncul apabila kepentingan yang lebih penting atau primer dapat terpenuhi. Selama kepentingan primer terpenuhi, kepentingan sekunder dapat terjadi.

Konsep kepentingan nasional dinilai menjadi instrument yang sangat penting untuk menjelaskan serta memahami perilaku internasional. Konsep ini

⁴¹ Dermawan, Rifki. "The National Interest Concept in a Globalized National System". Jurnal Universitas Andalas. 2020. Halaman 32

merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dalam memperoleh apa yang negara tersebut inginkan.⁴²

Para ahli yang menganut paham realis menyetarakan kepentingan nasional sebagai *effort* atau cara suatu negara dalam memperoleh kekuatan atau *power*, dimana sebuah *power* merupakan suatu kekuatan yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lainnya.⁴³ Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat dilakukan melalui cara pemaksaan atau kerja sama. Oleh karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam pelaksanaan politik internasional.⁴⁴

Kepentingan nasional juga dapat pula dijelaskan sebagai suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan atau kebijakan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakannya (foreign policy).⁴⁵ Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Belanda yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun mempunyai kepentingan nasionalnya, yakni memperluas wilayah serta melakukan eksploitasi terhadap sumber daya manusia maupun alam Indonesia saat itu. Sama halnya dengan yang Belanda lakukan saat ini, yakni melakukan diplomasi ke Indonesia dalam bentuk kebudayaan melalui program repatriasi benda cagar budaya. Indonesia mendapat keuntungan dengan mendapatkan kembali benda-benda budaya asli Indonesia yang dirampas oleh Belanda. Sedangkan Belanda mendapatkan keuntungan yakni mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia di bidang lain terutama ekonomi dan juga politik, serta memperbaiki citra Belanda

⁴² Schwarzenberger, George. "Power Politics". London: Prentice. 1964, halaman. 8

⁴³ Hoffman, Stanley. "Contemporary Theory in International Relations". New Jersey: Englewood Cliffs. 1977. Halaman. 7

⁴⁴ Ibid, halaman. 8

⁴⁵ Plano, Jack C, dan Olton, Roy. "Kamus Hubungan Internasional". Bandung: Abardin. 1999. Halaman 17

di hadapan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Belanda merupakan bangsa penjajah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Program pemulangan benda budaya atau repatriasi benda cagar budaya yang dilakukan negara penjajah ke negara bekas jajahan menjadi isu atau topik yang hangat untuk dibahas pada tahun 1980-an. Kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda saat itu tidak hanya menghancurkan sendi kehidupan sosial maupun ekonomi suatu bangsa, dalam kasus ini adalah Indonesia. Saat itu, pusaka dan benda bersejarah tak luput dari incaran, ada benda budaya yang rusak bahkan hancur diakibatkan oleh peperangan, ada yang dijarah dan dirampas serta dibawa ke negara penjajah, ada juga yang dibeli kemudian dibawa ke negara penjajah, namun ada juga yang dikembalikan melalui program repatriasi yang berarti pemulangan. Penjarahan benda pusaka terjadi di berbagai belahan dunia, seperti negara-negara benua Asia dan Afrika.

Tidak ingin tertinggal, Indonesia sebagai eks negara jajahan Belanda turut menuntut pemulangan benda-benda budaya nya yang tersebar di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, saat diadakan nya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Indonesia mulai mengajukan pengembalian benda budaya nya kepada Belanda, namun proses pengembalian benda budaya ini bisa dibilang melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Proses pengembalian benda budaya ini atau program repatriasi untuk pertama kali nya terjadi pada tahun 1970 an, dimana saat itu salah satu benda cagar budaya yaitu benda-benda kristal serta naskah manuskrip Kakawin Negarakretagama yang dijarah oleh pasukan KNIL pada tahun 1894 an. Pengembalian benda budaya ini dilakukan pada saat kunjungan Ratu Juliana

beserta suaminya ke Indonesia pada tahun 1971 sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Soeharto ke Belanda setahun sebelumnya.⁴⁶

Hingga saat ini, pengembalian benda budaya Indonesia masih berlangsung dan diprediksi selesai lima tahun kedepan. Program Repatriasi benda Cagar Budaya pada tahun 2020 dianggap besar karena salah satu benda yang dikembalikan merupakan benda milik salah satu pahlawan nasional asal Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro berupa senjata. Benda ini dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya karena memiliki nilai penting yang terkandung didalamnya, yang merepresentasikan kejeniusan manusia di masa itu, dan dapat menjadi acuan edukasi dan informasi di masa mendatang. Tentunya manfaat dari benda cagar budaya ini adalah menanamkan nilai budaya bagi bangsa Indonesia yang dapat menjadi asset ketika Indonesia melakukan diplomasi budaya ke negara lain.



⁴⁶ Pamungkas, M.Fazil. "Kunjungan Pertama Penguasa Belanda ke Indonesia". (<https://historia.id/politik/articles/kunjungan-pertama-penguasa-belanda-ke-indonesia-v5bY9>), (Maret 2020), diakses pada 1 Juni 2022